

PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS UNTUK KEMANDIRIAN**PROGRAM FAMILY VILLAGE QUALITY FOR INDEPENDENCE****Nafa Grilda Sagita*, Lukman Arif**

Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Koresponden email: lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penduduk memainkan peran penting dalam kesuksesan negara dengan memberikan kontribusi pada perkembangan negara melalui beragamnya sumber daya yang dimiliki. Namun, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mengubah struktur suatu negara dan menjadi masalah serius jika tidak dikelola secara efektif. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk melalui Program Kampung KB yang dikelola oleh BKKBN, untuk meningkatkan kualitas infrastruktur fisik dan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut George Charles Edward III dalam Sahya Anggara (2014) yang mengidentifikasi implementasi kebijakan kedalam empat faktor. Lokasi penelitian ini di Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan penelusuran dokumen yang kemudian data di konsensasi, disajikan dan disimpulkan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru telah terlaksana dengan baik, tetapi masih diperlukan peningkatan pada aspek sumber daya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Diharapkan, melalui program ini, pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas yang diberikan kepada masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, program, kebijakan, pelayanan publik, Kampung KB

ABSTRACT

Population plays an important role in a country's success by contributing to its development through its diverse resources. However, rapid population growth can change the structure of a country and become a serious problem if not managed effectively. The government has made various efforts, including through the KB Village Program managed by BKKBN, to improve the quality of physical infrastructure and human resources. This study aims to determine and analyze the implementation of the KB Village program in Kapasmadya Baru Village. The theory used is the theory of policy implementation according to George Charles Edward III in Sahya Anggara (2014) which identifies policy implementation into four factors. The location of this research is Kapasmadya Baru Village, Tambaksari Subdistrict, Surabaya City. This research uses a qualitative approach and data collection is done through observation, interviews and document searches which then the data is concentrated, presented and concluded. The results showed that the implementation of the KB Village program in Kapasmadya Baru Village has been carried out well, but improvement is still needed in the aspect of resources, both in terms of quantity and quality. Hopefully, through this program, the government can improve the quality and quantity provided to the community.

Keywords: Implentation, programs, policies, public services, Family Planning Villagest.

PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Sebagai perencana dan pelaksana kebijakan, pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, memprioritaskan aspirasi rakyat dalam proses pembangunan, serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan efektif dan efisien. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antara berbagai program dan kegiatan pengendalian angka kelahiran. Upaya ini melibatkan berbagai sektor pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan, transmigrasi, kesehatan, pengendalian urbanisasi, penciptaan lapangan kerja,

serta pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur di daerah. Penurunan laju pertumbuhan penduduk dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu tingkat rumah tangga.

Setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang dapat dikatakan tidak sedikit jumlahnya, peningkatan ini tentukan akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber dayanya. Kualitas SDM di Indonesia di golongan cukup rendah yang akan menghambat pembangunan baik dari segi pemerntahan maupun masyarakat. Saat ini Indonesia tercatat memeiliki skor sebanyak 51,13 poin dengan berada di urutan ke 9 (Sembilan) dalam penyortiran kualitas SDM di Benua Asia.

Permasalahan kependudukan yang dibiarkan tanpa adanya solusi yang tepat dari segi pen-

didikan, kesehatan, maupun ekonomi akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan seperti stunting, kriminalitas meningkat, dan kurangnya pendidikan. Tanpa adanya pemahaman yang sama dari pelaksana kebijakan dengan masyarakat, akan mempersulit pencapaian dari program Kampung KB. Akibatnya, kualitas sumber daya masyarakat akan semakin menurun dan sulitnya mencapai harapan keluarga sejahtera. Meskipun begitu, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus terus berupaya mengatasi tantangan di sektor masyarakat melalui penciptaan program-program unggulan. Program tersebut diharapkan dapat menjadi faktor peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada di Indonesia.

Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa di mana terjadi integrasi dan konvergensi dalam upaya pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam semua aspeknya, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus utama pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang mengikuti siklus kehidupan manusia.

Kota Surabaya, sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur, menjadi fokus bagi BKKBN Jawa Timur Perwakilan Surabaya dan Bapemas KB Kota Surabaya untuk menginisiasi Kampung KB. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Jawa Timur, terutama di Kota Surabaya. Saat ini, setiap Kecamatan di Kota Surabaya sudah memiliki setidaknya satu Kampung KB, salah satunya ialah Kampung KB WR Soepratman yang terletak di Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, proporsi penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Surabaya adalah sekitar 50,3% perempuan dan 49,7% laki-laki, dengan jumlah total penduduk mencapai 3.157.396 jiwa. Kecamatan Tambaksari menunjukkan jumlah penduduk tertinggi, mencapai 239.289 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Sawahan dan Semampir dengan masing-masing 216.391 jiwa dan 206.071 jiwa.

Wilayah Kecamatan Tambaksari memiliki karakteristik yang luas dan padat, dengan masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama. Kecamatan Tambaksari terdiri dari 8 Kelurahan salah satunya yakni Kelurahan Kapasmadya Baru yang mayoritas penduduknya berpenghasilan dari berjualan atau wiraswasta. Kelurahan Kapasmadya Baru terdiri dari 8 RW

dan 92 RT dengan jumlah penduduk 39.577 jiwa menjadi satu tantangan dalam menghadapi permasalahan kompleks yang terjadi. Banyaknya jumlah penduduk di wilayah kelurahan Kapasmadya Baru tentunya akan mempengaruhi berbagai sektor seperti pendidikan rendah, ekonomi kecil, pelayanan cepat tanggap, beresiko stunting dan sebagainya.

Dalam program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga) yang dirancang untuk menekan laju pertumbuhan penduduk membutuhkan peran besar dari masyarakat dalam mengikuti kepesertaan ber-KB. Salah satu tujuan utama dari program terkait adalah meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi modern oleh Pasangan Usia Subur (PUS) untuk meningkatkan efektivitasnya. Saat ini berberbagai macam alat kontrasepsi modern telah disediakan sebagai pilihan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) sesuai dengan kebutuhannya seperti IUD, kondom, pil, suntik, implan, Medis Operasi Wanita (WOM), serta Medis Operasi Pria (MOP). Meskipun telah disediakan alat kontrasepsi modern, masih ada beberapa Pasangan Usia Subur (PUS) maupun suami-isteri yang telah memiliki dua anak menggunakan alat kontrasepsi tradisional seperti pantang berkala/kalender, pijak urut, jamu, dan senggama terputus. Namun tentu saja tetap diberikannya motivasi untuk mengguna kontrasepsi jangka panjang, sehingga program KB dapat terus berjalan dengan efektif dan efisien.

Program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Program ini memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan dengan kerangka pembangunan termasuk program keluarga berencana. Keluarga berencana adalah upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Selain itu keluarga berencana merupakan program pemerintah yang bertujuan menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk (Jitowiyono & Rouf, 2019).

Tabel 1. Jumlah Pasangan Usia Subur di Kecamatan Tambaksari Tahun 2021

No.	Kelurahan	Jumlah PUS
1.	Tambaksari	1.884
2.	Ploso	4.155
3.	Gading	3.689
4.	Pacarkembang	4.360
5.	Rangkah	1.987
6.	Pacarkeling	2.152
7.	Kapasmadya Baru	5.102
8.	Dukuh Setro	3.450
Jumlah Total		26.779

Berdasarkan tabel data, menunjukkan bahwa Kelurahan Kapasmadya Baru memiliki jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) terbanyak. Tabel tersebut mencerminkan angkat atau persentase yang signifikan dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Tingginya jumlah PUS ini akan mempengaruhi peningkatan angka kelahiran di Kota Surabaya.

Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dianggap sebagai langkah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya program KB bagi masyarakat maupun pemerintah. Program Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan dapat membantu menekan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, dan mensejahterakan keluarga melalui program-program yang ada di dalamnya dengan adanya kolaborasi dengan berbagai Lembaga pemerintahan, Perusahaan swasta, dan tentunya masyarakat sekitar. Diharapkan program-program yang ada pada Kampung KB dapat membantu kemajuan daerah dari berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, transmigrasi, pengendalian urbanisasi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah bagi dari segi infrastruktur maupun non infrastruktur.

Implementasi melibatkan berbagai langkah dan usaha yang dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama, baik di dalam lembaga pemerintah, sektor swasta, maupun instansi lainnya (Hertati & Arif, 2018). Edward III, sebagaimana dikutip oleh (Arifin.T, 2018), implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan yang terletak di antara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau dampak yang dihasilkan oleh kebijakan (*output, outcome*).

Implementasi kebijakan merupakan bentuk dari pelaksanaan suatu kebijakan dengan melibatkan berbagai sektor baik dari segi pemerintahan maupun masyarakat melalui pelayanan, pengorganisasian birokrasi, dan sebagainya. Menurut Edward III sebagaimana dikutip oleh (Anggara, 2014), terdapat 4 (empat) faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan, yakni: 1) Komunikasi, merupakan faktor krusial yang memengaruhi kesuksesan suatu kebijakan, dimana implementator harus memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang perlu dilakukan dan dalam pelaksanaannya komunikasi yang tepat, akurat, dan konsisten sangat penting, 2) Sumber Daya, ketersediaan sumber daya penting untuk implementasi kebijakan apabila terjadi krisis sumber daya maka akan menghambat pelaksanaan kebijakan dan mengurangi hasil yang diharapkan, adapun sumber daya yang dibutuhkan ialah sumber daya manusia, anggaran, peralatan

dan kewenangan, 3) Disposisi, merujuk pada sikap dan komitmen yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan terhadap program, seperti kesediaan, integritas, dan pendekatan demokratis, selain itu sikap positif ini penting dalam pelaksanaan kebijakan agar dapat mencapai hasil yang optimal, dan 4) Struktur Birokrasi, ditekankan perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur alur kerja di antara pelaksana kebijakan, serta diperlukan fragmentasi ketika implementasi kebijakan melibatkan beragam program dan pihak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018), pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami konteks ilmiah, di mana peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data secara triangulasi. Penelitian dilaksanakan di Kampung KB Kelurahan Kapasmadya Baru Kota Surabaya, dipilih karena tingginya jumlah penduduk dan Pasangan Usia Subur (PUS) di daerah tersebut yang masuk dalam 10 besar wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari berbagai sumber seperti BKKBN, DP3APPKB, PKB, Pokja, dan partisipasi masyarakat, sementara data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan artikel yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2014), yang melibatkan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Surabaya telah melebihi standar minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan adanya satu Kampung KB di setiap Kecamatan. Namun, Pemerintah Pusat terus berusaha untuk memperluas cakupan Kampung KB dengan mendirikan satu Kampung KB di setiap Kelurahan di seluruh Indonesia. Keputusan ini tidak diambil begitu saja, melainkan karena masih ada ketidakoptimalan dalam pelaksanaan Kampung KB di beberapa daerah. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022, diharapkan peningkatan pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas bisa menjadi sebuah Gerakan bersama di setiap desa/kelurahan. Gerakan ini diharapkan dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam upaya pemberdayaan serta penguatan in-

stitusi keluarga dalam semua dimensinya, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat.

Edward III mengidentifikasi empat faktor kunci yang memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Model implementasi program atau kebijakan Edward III dapat berperan sebagai alat untuk mengilustrasikan bagaimana program dan kebijakan diimplementasikan di berbagai konteks dan waktu. Oleh karena itu, model tersebut dapat digunakan untuk memahami proses implementasi kebijakan secara menyeluruh (Riyadiana & Arif, 2023).

Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pemahaman dari berbagai elemen dalam bekerjasama secara harmonis untuk kelancaran Program Kampung KB. Pengkomunikasian yang terjadi pada implementor sangat diperlukan agar terciptanya dukungan dan komitmen baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pada indikator komunikasi, terdapat 3 (tiga) sub indikator, yakni transmisi, kejelasan, dan konsisten.

a. Transmisi

Transmisi merupakan saluran komunikasi yang menyebarkan agar program Kampung KB dikomunikasikan dengan tepat tidak hanya kepada pelaksana tetapi juga kepada masyarakat. Dalam hal ini Pelaksana Program Kampung KB di Kapasmadya Baru Kota Surabaya melakukan transmisi komunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan baik. Penyaluran informasi dan edukasi dilakukan secara langsung oleh pelaksana dengan cara “Grobyokan” yang mana kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga untuk bersosialisasi, pendataan, dan pemberian edukasi. Sedangkan untuk penyaluran informasi secara tidak langsung pelaksana dilakukan dari tingkat atas hingga kebawah, yang dimaksud ialah BKKBN hingga Pokja. Dalam implementasinya pelaksana menggunakan WhatsApp Group dan surat elektronik untuk mempermudah penyampaian informasi. Tentu saja ini dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagi data atau informasi di dalam maupun antar pemerintahan (Mukhsin, 2020).

b. Kejelasan

Kejelasan yang dimaksud dalam hal ini adalah kejelasan terkait pelaksanaan kebijakan publik itu sendiri. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kapasmadya Baru. Dalam implementasi program Kampung KB ini, pelaksana kebijakan sudah melakukan tupoksi dengan baik. Kejelasan da-

lam penyampaian informasi tidak hanya ditujukan kepada para pelaksana, tetapi juga mencakup pemahaman yang jelas dari masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Terbukti dari partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program seperti Posyandu, Keluarga Berencana (KB), Karang Taruna, Unit Pengelola Program Kesejahteraan Sosial (UPPKS), dan sebagainya, menandakan bahwa informasi telah diterima dengan jelas oleh mereka.

c. Konsisten

Edward III dalam (Winarno, 2016) menyatakan bahwa untuk menjalankan implementasi kebijakan secara efektif, konsistensi dalam perintah-perintah pelaksanaan sangatlah penting. Ketidakkonsistenan dalam perintah-perintah implementasi kebijakan akan mendorong pelaksana untuk menafsirkan dan menerapkan kebijakan secara longgar. Konsistensi DP3APPKB sebagai pelaksana kebijakan selalu melakukan kegiatan diskusi rutin yang dihadiri oleh PKB dan perwakilan Pokja, yang mana dalam diskusi itu membahas perihal kegiatan di Kampung KB dan juga program-program selanjutnya. Selain itu Pokja dan PKB sebagai pelaksana kebijakan yang berada dilapangan juga telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan rutin serta sosialisasi yang diadakan di Kampung KB Kapasmadya Baru, serta tercapainya pemahaman pegawai dan juga masyarakat terkait program yang ada di Kampung KB Kapasmadya Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek komunikasi, implementasi program Kampung KB di Kapasmadya Baru telah berjalan lancar sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti dari komunikasi yang tepat, jelas, dan konsisten yang dilakukan dari pihak yang bertanggung jawab hingga ke level masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut meliputi BKKBN, DP3APPKB, PKB, POKJA, serta masyarakat. Selain itu mayoritas masyarakat juga mengetahui jika wilayahnya telah memiliki Kampung KB, yang mana didalamnya terdapat berbagai macam program yang dapat membantu keluarga mereka. Implementor telah mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengkomunikasian secara internal maupun eksternal kepada pihak yang memiliki kepentingan dan juga masyarakat.

Sumber Daya

Menurut Edward III yang dikutip dalam (Widodo, 2021), faktor sumber daya memegang peranan kunci dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks indikator sumber daya, terdapat empat sub-indikator, yaitu sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan.

a. Sumber daya manusia (staff)

Sub-indikator ini berkaitan dengan kesesuaian dan kecukupan antara jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan keterampilan yang diperlukan sesuai dengan pelaksanaan program Kampung KB di Kapasmadya Baru. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta dilapangan bahwa sebenarnya dalam pengimplementasian program Kampung KB ini, baik dari DP3APPKB, PKB, hingga Pokja masih kekurangan SDM yang mencukupi. Tingkat pembaruan data oleh para pelaksana masih sangat rendah. Ketidakkampuan untuk memperbarui data dengan cepat dapat berdampak pada evaluasi kebijakan di Kampung KB Kapasmadya Baru. Selain itu, anggota POKJA didominasi oleh warga lanjut usia yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi.

b. Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru. Selain itu, sumber daya anggaran ini diperlukan untuk membiayai berbagai operasional yang terkait dengan implementasi kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pendanaan berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan oleh pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB), yang diwakili oleh DP3A-PPKB Kota Surabaya. Dana yang diterima nantinya akan dialokasikan kepada setiap Kampung KB.

Selain itu terdapat variasi sumber pendanaan melalui beberapa sumber, yaitu: APBN, APBD, Donasi/Hibah Masyarakat, Perusahaan (CSR - Corporate Social Responsibility), dan Swadaya Masyarakat. Untuk alokasi anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) seharusnya dimanfaatkan untuk menutupi biaya operasional para pelaksana program. Meskipun demikian, tidak ada alokasi anggaran khusus untuk kegiatan Kampung KB sehingga seluruh kegiatan bergantung pada dana swadaya dari masyarakat dan Pokja. Meskipun pada dasarnya anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung seluruh operasional kegiatan Kampung KB, namun kenyataannya, dana yang tersedia hanya digunakan untuk kegiatan rapat atau pertemuan implementor. Keseluruhan kegiatan di Kampung KB Kapasmadya Baru selama ini masih mengandalkan dana pribadi anggota dan iuran dari warga setempat. Fakta ini menunjukkan bahwa sumber daya anggaran untuk Kampung KB di Kapasmadya Baru masih belum mencapai tingkat optimal.

c. Sumber daya peralatan (fasilitas)

Sub-indikator ini mencakup sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasional implementasi sebuah program atau kebijakan. Berkaitan dengan ketersediaan fasilitas fisik untuk menunjang implementasi Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru. Terkait dengan sarana prasarana, Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru memiliki fasilitas berupa non fisik maupun fisik. Fasilitas non fisik, Kampung KB Kapasmadya Baru telah memiliki semua fasilitas yang diperlukan, tetapi terkendala dalam pembaruan data, sehingga fasilitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, dalam hal fasilitas fisik, Kampung KB Kapasmadya Baru tidak memiliki tempat penyimpanan berkas dan lainnya, sehingga para pelaksana mengalami sedikit kesulitan dalam mengarsipkan data, dan setiap kegiatan harus difasilitasi oleh Kelurahan Kapasmadya Baru. Kurangnya ketersediaan fasilitas dalam proses implementasi dapat mempengaruhi baik kinerja pelaksana kebijakan maupun tujuan dari kebijakan.

d. Sumber daya kewenangan

Sub-indikator ini mencakup informasi dan juga kewenangan implementor dalam mengimplementasikan Program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru. Kewenangan ini dapat berupa penyediaan barang, jasa, informasi, dan kewenangan lainnya. Kewenangan dari Program Kampung KB ini dari BKKBN lalu diteruskan langsung kepada DP3APPKB yang merupakan OPDKB di wilayah Kota Surabaya yang mana akan turun ke PKB wilayah Kecamatan Tambaksari dan langsung diteruskan kepada Pokja selaku pelaku utama yang ada di wilayah dan yang paling dekat dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan dan juga menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

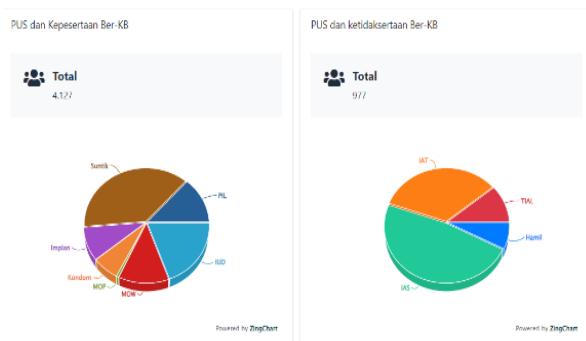
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kewenangan sudah jelas teratur bahwa BKKBN dan DP3APPKB hanya memberikan arahan yang nantinya akan dilaksanakan oleh PKB dan Pokja yang ada di Kampung KB Kapasmadya Baru sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2022. Dalam elegasi kewenangan, komunikasi informasi dan keputusan antara pelaksana kebijakan telah berjalan lancar, namun masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan data yang mengakibatkan ketidakakuratan pembaruan data. Hal ini menandakan bahwa sumber daya yang tersedia di Kampung KB Kapasmadya Baru masih belum mencukupi untuk menjalankan implementasi Program Kampung KB dengan optimal.

Disposisi

Disposisi mencakup sikap dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap program, seperti komitmen, integritas, dan sikap demokratis dari pelaksana kebijakan. Pada indikator disposisi, terdapat tiga sub-indikator yang memengaruhi kemampuan dan keinginan pelaksana kebijakan, yaitu: kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, dan intensitas respon.

a. Kognisi

Kognisi ini berkaitan dengan sejauh mana pemahaman implementor terhadap tujuan dan proses implementasi program Kampung KB di Kapasmadya baru. Pemahaman para implementor mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 dan juga SK Kecamatan terkait Kampung KB di Kapasmadya Baru. Pemahaman para implementor telah sesuai dengan tupoksi dan karakteristik wilayahnya. Hal ini dilihat dari keberadaan budidaya ikan dan penanaman anggur di belakang halaman Kelurahan Kapasmadya Baru, serta partisipasi aktif Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengikuti program KB di Kampung KB Kapasmadya Baru. Di samping itu, para pelaksana telah melakukan upaya secara konsisten dan terus-menerus. Ini tercermin dari rutinitas grobyokan dan berbagai kegiatan lain seperti posyandu untuk lansia dan balita, kegiatan karang taruna, serta penyuluhan kepada Pasangan Usia Subur dan ibu hamil.



Gambar 1. Pasangan Usia Subur (PUS) Kampung KB Kapasmadya Baru

b. Arahan dan tanggapan

Arahan dan tanggapan meliputi penerimaan ataupun penolakan pelaksana kebijakan dalam menyikapi kebijakan. Dalam hal ini implementor kebijakan memberikan arahan dan tanggapan terkait dengan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kapasmadya Baru. Untuk arahan langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat yang akan disampaikan kepada implementor untuk implementasinya, yakni dari BKKBN kepada OPDKB agar segera disampaikan kepada PKB dan Pokja di Kampung KB. Implementor Kampung KB Kelurahan Kapasmadya Baru untuk implementasi telah berjalan sesuai dengan harapan

walaupun masih adanya kendala, tetapi secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik. Untuk arahan sendiri para Pokja melakukan rapat koordinasi sebelum melakukan “Grobyokan” yang membahas terkait beberapa prioritas penanganan tiap masyarakat. Tak hanya itu, Pokja juga rutin berdiskusi dengan PKB Kecamatan terkait dengan prioritas program dan juga kesulitan atau kendala yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat diketahui bahwa para implementor kebijakan Program Kampung KB di Kapasmadya Baru telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan arahan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan adanya hambatan yang dapat menjadi bahan evaluasi ke depannya.

c. Intensitas respon

Intensitas respon ini berkaitan dengan adanya respon yang mendalam dan terus-menerus terhadap implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan dan dilakukan oleh Kader/PKB kepada masyarakat yaitu dengan wawancara, pemberian edukasi, mengajak secara persuasif dan selalu melakukan perkembangan. Intensitas respon pelaksana memiliki sikap yang sabar dan telaten dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa interaksi masyarakat Kapasmadya Baru dengan implementor berjalan dengan baik. Hal ini memperkuat bahwa paguyuban yang ada di Kapasmadya Baru terjalin dengan baik sehingga dalam implementasi program Kampung KB dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Hasil penelitian pada indikator disposisi menunjukkan bahwa program Kampung KB di Kapasmadya Baru telah terimplementasi dengan optimal. Tujuan yang telah disebutkan sebelumnya berhasil tercapai dengan baik, yang dibuktikan dengan upaya terus-menerus dari para kader, anggota Pokja, PKB, DP3APKB, dan BKKBN dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui pendampingan, pembinaan, edukasi, sosialisasi, dan evaluasi. Antusiasme masyarakat Kapasmadya Baru terhadap program Kampung KB serta komitmen para implementor yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya juga memberikan dampak positif terhadap pemberian layanan kepada masyarakat.

Struktur Birokrasi

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa struktur birokrasi terkait *Standar Prosedur Operasional* (SOP) dan pembagian tugas serta tanggung jawab para pelaksana, seperti PKB dan Pokja, telah berjalan dengan cukup baik sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2022. Mengenai fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kerja, pelaksanaan implementasi program Kampung KB telah diatur dalam

Surat Keputusan Lurah Kapasmadya Baru Nomor: 400.13/0431/436.9.25.3/2023 tentang Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas "WR. SOEPRATMAN" di Kelurahan Kapasmadya Baru. Sementara itu, mengenai *Standar Prosedur Operasional* (SOP), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Juknis yang berlaku.

SIMPULAN

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas. Pada indikator komunikasi penyampaian serta kejelasan program telah tersampaikan dengan baik kepada implementor dan juga masyarakat. Indikator Sumber daya menunjukkan adanya tidak optimalan pada pelaksanaan program. Pada indikator disposisi sudah telaksana dengan cukup baik dengan tercapainya beberapa tujuan program. Dan indikator Struktur birokrasi telah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 serta juknis yang berlaku.

Mendasarkan pada analisis temuan penelitian diatas, maka hasil analisis yang digunakan dengan pendekatan implementasi kebijakan dengan model George C. Edward III menunjukkan bahwa meskipun implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru telah terealisasi dengan baik, namun masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, seperti terbatasnya ketersediaan infrastruktur, terbatasnya pengetahuan dan juga SDM, serta terbatasnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah sehingga kegiatan menggunakan dana masyarakat. Berdasarkan hambatan tersebut, seharusnya diberikan solusi berupa penambahan staff, pengalokasian dana, fasilitas yang memadai, serta adanya sosialisasi rutin bagi implementor dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: CV. Pustaka Setia
- Apriani, E., Idris, M., & Damayanti, N. (2021). Efektivitas Program Kampung Kb Di Desa Sidorejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Swarnabhumi*, 6(1), 38–45.
- Arifin.T. (2018). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Bachtiyar, N. A., & Wibawani, S. (2018). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Dusun Ambeng-Ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance: Jurnal*

- Ilmu Administrasi Negara*, 7(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v7i1.1194>
- Hertati, D., & Arif, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(1), 40–49. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i1.8>
- Kb, K., Kelurahan, R. W., Kota, K., Musfiroh, M., Mulyani, S., C, E. B., & Nugraheni, A. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Surakarta Analysis Of Family Resilience Factors In Kampung KB RW 18 , Kadipiro Village , Surakarta City*. 7(2), 61–66.
- HM, R., & Indrawadi, J. (2019). Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(4), 295–301. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.233>
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022. tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. (2022).
- Jitowiyono. S & Rouf, M A (2019). *Keluarga Berencana Dalam Perspektif Bidan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Jumria, M. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Ekonomi Islam*, VI(Ii), 324–334.
- Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(3), 258–266.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 324–334.
- Maulana, N. 201. (2019). *Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik* (Issue September).
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19.
- Mukhsin. (2020). Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi. *Teknokom*, 7.
- Mursalim, S. W., Hasibuan, A., Sulaiman, Oris kianto, Mulyanie, E., Husna, R. A., Apriandi, I., Maiti, Bidinger, Suryana, A., Iskandar, A., Hernawan, D., Dengo, S., Rahmadanita, A., Santoso, E. B., Wasistiono, S., Marisa, H., Andree, Sarbini, A., Kusuma, A. R., ... Theory, P. (2019).

- Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 2). <https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/image/s/web/files/buku-2.-masterplan-smart-city-kota-bogor.pdf>
- Rahman, A., Zebua, W. D. A., Satispi, E., Hidayah, T. N., & Aini, Z. (2023). Evaluasi Kebijakan Kampus Merdeka Program Praktisi Pengajar. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 515-523.
- Riyadiana, N., & Arif, L. (2023). Implementasi Program Swargaloka (Suara Warga Mengelola Kebutuhan Adminduk) Dalam Memberikan Edukasi Tentang Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 507–518. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8317802>
- Sitakar, S. S. A., & Rangkuti, Z. A. (2024). TATA Kelola Program CSR Melalui Collaborative Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 238-246.
- Situmorang, C. H. (2016). Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc. *Social Security Development Institute (Ssdi)*, 324.
- Subhan, M., Zulkarnaini, Z., Meiwanda, G., & Putri, R. A. (2022). Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 439-454.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing Copyright*.
- Watik, D., Trisiana, A., & Novitasari, F. (2022). Analisis Peran Pemerintahan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. *Research Fair Unisri*, 6(1), 45–56. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v6i1.6853>
- Yulian Widya Saputra, Lukas, Titin A, R. S. R. (2019). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Kota Samarinda. *Ejournal.Stikku.Ac.Id*, 2019, 27–33. <https://Ejournal.Stikku.Ac.Id/Index.Php/Stikku/Article/View/64>
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative Governance Melalui Program Kampung Kb Di Kabupaten Jombang. *CosmoGov*, 5(2), 162. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.21814>
- Wahyudi, R., & Hadi, L. (2020). Program Pembangunan Masyarakat Pulau. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 13-18.
- Widodo, J. M. S. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (12 Ed.). Media Nusa Creative (Mnc Publishing).
- Zuhriyah, A., Indarjo, S., Budi, B., Kesehatan, R. P., Perilaku, I., Ilmu, J., & Masyarakat, K. (2017). *Higeia Journal Of Public Health Research And Development Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efek-Tivitas Program Keluarga Berencana Info Artikel*. 1(4), 1–13.